



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**BADAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL DAERAH (BPPMD)**

Website : <http://bppmd.kaltimprov.go.id> Email : [humas@bppmd.kaltimprov.go.id](mailto:humas@bppmd.kaltimprov.go.id) / [humas.bppmdkaltim@gmail.com](mailto:humas.bppmdkaltim@gmail.com)  
Jalan Basuki Rahmad No. 56 Telepon (0541) 743235, 743487, Fax (0541) 736446  
S A M A R I N D A 7 5 1 1 7

---

**REALISASI INVESTASI DAN REALISASI PENERBITAN IZIN  
PENANAMAN MODAL DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
PADA TRIWULAN II TAHUN 2013**

**Samarinda, 29 Agustus 2013;** Pada hari ini Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD) Provinsi Kalimantan Timur mengumumkan pencapaian realisasi investasi, yang menggunakan fasilitas PMDN maupun PMA, serta realisasi penerbitan izin penanaman modal untuk triwulan ke-II tahun 2013. Realisasi investasi dimaksud didasarkan atas penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang diterima oleh BPPMD, diakumulasi dengan laporan yang diterima oleh BKPM.

Memasuki triwulan II ini (April – Juni), realisasi investasi yang telah dicapai di Kalimantan Timur; untuk PMDN sebesar Rp 3.280,69 milyar dengan jumlah proyek sebanyak 27 proyek, sedangkan PMA sebesar \$ US 487,20 juta yang mencakup 105 proyek, sehingga realisasi investasi secara kumulatif (semester I; Januari – Juni) telah mencapai **Rp 13.738,41** milyar atau Rp 13,74 triliun (dengan asumsi Rp 9.000,-/US \$ 1). **Realisasi ini dikaitkan dengan target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar Rp 34,5 triliun, maka tingkat pencapaian target-nya adalah 39,83 %.** Adapun tenaga kerja yang terserap sebanyak 626.376 orang, yang terdiri dari penyerapan tenaga kerja dari proyek-proyek PMDN sebanyak 239.810 orang dan PMA sebanyak 386.376 orang.

Sementara terkait dengan perizinan penanaman modal yang telah dikeluarkan oleh BPPMD melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP); Pada triwulan II ini telah dikeluarkan izin, baik berupa pendaftaran penanaman modal, izin prinsip, izin usaha dan izin penggabungan usaha, dengan jumlah izin sebanyak 16 izin, yang nilai-nya mencapai Rp 5.584,93 milyar, sehingga nilai kumulatifnya sampai dengan semester I sudah mencapai Rp 12.534,76 milyar; **Dikaitkan dengan target yang direncanakan sebesar Rp 30,4 triliun, maka realisasi dimaksud sudah mencapai 41,23 %.**

## Realisasi Investasi Triwulan II

Pada triwulan I sebelumnya, realisasi investasi yang menggunakan fasilitas PMDN mencapai Rp 4.845,94 milyar, dengan jumlah proyek sebanyak 24 proyek; Selanjutnya memasuki triwulan II – seperti telah disebutkan sebelumnya, maka realisasi kumulatif investasi PMDN ini mencapai Rp 8.126,64 milyar, yang terdiri atas 51 proyek, dimana sektor usaha yang cukup dominan adalah : (a) jasa lainnya (sektor tersier) yang umumnya masih ada kaitannya sektor penunjang usaha pertambangan; (b) industri kimia dasar, barang kimia dan farmasi (sektor sekunder); serta (c) tanaman pangan, perkebunan dan industri pengolahan (sektor primer). Pencapaian realisasi ini secara nasional cukup mengembirakan, karena **menduduki urutan ke-2 setelah Jawa Timur**.

Berikutnya mengenai investasi PMA; Pada triwulan I sebelumnya baru mencapai US \$ 136,34 juta, yang mencakup 78 proyek. Seperti telah disebutkan sebelumnya, memasuki triwulan II terdapat peningkatan signifikan – sehingga secara akumulatif mencapai US \$ 623,53 juta, dengan cakupan proyek sebanyak 183 proyek; Dan ini merupakan suatu prestasi yang mengembirakan, karena termasuk urutan **ke-7 terbesar, setelah Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, Jawa Timur, Papua dan Riau**.

Adapun sektor usaha yang cukup mendominasi PMA di Kalimantan Timur adalah : (a) tanaman pangan, perkebunan dan industri pengolahan (sektor primer); (b) perdagangan dan reparasi, perumahan, kawasan industri dan perkantoran; dan jasa lainnya (sektor tersier); serta (c) industri makanan, industri mineral non logam dan industri karet dan plastik (sektor sekunder).

**Tabel 1**  
**Realisasi Investasi Triwulan II Tahun 2013**  
**Provinsi Kalimantan Timur**

No	Investasi	Triwulan I		Triwulan II		Kumulatif (Semester I)	
		Nilai Investasi	Proyek	Nilai Investasi	Proyek	Nilai Investasi	Proyek
1	PMDN (milyar Rp)	4.845,94 <sup>1)</sup>	24	3.280,69 <sup>2)</sup>	27	8.126,64 <sup>3)</sup>	51
2	PMA (juta US \$)	136,34 <sup>4)</sup>	78	487,20 <sup>5)</sup>	105	623,53 <sup>6)</sup>	183

Catatan : Asumsi US \$ 1 setara Rp 9.000,-, maka nilai investasi PMA semester I setara Rp 5.611,77 milyar, sehingga PMDN + PMA mencapai Rp 13.738,41 milyar

Keterangan :

1) Urutan ke-2 nasional.

2) Urutan ke-2 nasional.

3) Urutan ke-2 nasional.

4) Urutan ke-12 nasional.

5) Urutan ke-6 nasional.

6) Urutan ke-7 nasional.

Sumber : BKPM dan BPPMD Provinsi Kalimantan Timur.

Untuk meningkatkan realisasi investasi pada triwulan ke-III mendatang BPPMD Provinsi Kalimantan Timur, bekerjasama dengan BKPM akan lebih mengintensifkan lagi kegiatan penghimpunan LKPM, dengan melakukan upaya pembinaan, pemantauan dan pengawasan langsung ke lapangan (perusahaan yang mendapatkan fasilitas PMDN dan PMA) sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM No. 3 Tahun 2012.

## Realisasi Perizinan Penanaman Modal Triwulan II

Memasuki triwulan II ini, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM No. 5 Tahun 2013, terdapat penyederhanaan prosedur perizinan dan non perizinan penanaman modal, yang diharapkan akan lebih mendorong peningkatan pelayanan yang berkorelasi terhadap peningkatan penanaman modal di Kalimantan Timur; terkait dengan langkah penyederhanaan tersebut – diantaranya adalah penghapusan pendaftaran penanaman modal dan penerapan *tracking system*,

Diterapkannya *tracking system* ini, walaupun masih dalam uji coba bersama dengan 10 provinsi lainnya di Indonesia, akan memberikan keuntungan tersendiri – karena penanam modal (investor) akan dapat memantau secara on line tahapan penyelesaian izin yang diajukan, sehingga prosedurnya menjadi lebih transparan. Badan Perijinan dan Penanaman Modal melalui PTSP, telah mempersiapkan SDM dan perangkat keras penunjangnya. Hal ini sejalan pula dengan sertifikat ISO yang telah didapatkan dan pembenahan lay out PTSP, Disamping itu, secara keseluruhan – sistem yang ada diinternal BPPMD disinkronkan menjadi satu sistem, yang mudah diakses oleh semua stakeholder (akan segera *launching*).

Pelbagai langkah yang telah disebutkan diatas pada prinsipnya adalah untuk lebih meningkatkan pelayanan perizinan penanaman modal, mengingat izin yang telah dikeluarkan (terutama izin usaha) menjadi salah indikator peningkatan realisasi investasi pada tahun-tahun berikutnya.

Pada triwulan II ini, berdasarkan lokasi penanaman modal yang dimintakan izin-nya, maka Kabupaten Kutai Timur, Berau dan Kutai Barat menduduki 3 besar pada tingkat regional (Kalimantan Timur), yaitu masing-masing secara berurutan adalah 35,80 %, 26,71 % dan 18,38 %. Tenaga kerja yang dapat diserap, yang keseluruhannya adalah tenaga kerja Indonesia – mencapai 22.697 orang.

**Tabel 2**  
**Pensebaran Izin Penanaman Modal Berdasarkan Lokasi Pada**  
**Triwulan II Tahun 2013 di Provinsi Kalimantan Timur**

No.	Kabupaten/Kota	Nilai investasi (juta Rp)	% <sup>1)</sup>	Penyerapan Tenaga Kerja (org) <sup>2)</sup>
1	Samarinda	40.235,00	0,72	287
2	Balikpapan	26.875,80	0,48	52
3	Kutai Kartanegara	61.429,16	1,10	97
4	Berau	1.491.676,97	26,71	1.739
5	Bontang	742.751,61	13,30	112
6	Kutai Timur	1.999.157,45	35,80	805
7	Tarakan	-	-	-
8	Nunukan	-	-	-

9	Kutai Barat	1.026.726,25	18,38	3.268
10	Bulungan	-	-	-
11	Tanah Tidung	-	-	-
12	Malinau	-	-	-
13	Paser	196.086,06	3,51	503
14	Paser Penajam Utara	-	-	-
T o t a l		5.584.928,29	100,00	22.697

Keterangan :

1) Prosentase terhadap nilai total.

2) Merupakan tenaga kerja Indonesia.

Sumber : BPPMD Provinsi Kalimantan Timur.

Dominannya ke-3 Kabupaten diatas terhadap permintaan izin penanaman ini ada kaitannya dengan potensi lahan perkebunan yang ada, termasuk industri pengolahannya; dan khususnya di Kutai Timur – tidak terlepas dengan langkah antisipasi yang dilakukan investor untuk mendapatkan manfaat akan dibangunnya KIPI Maloy sebagai bagian dari Kawasan Ekonomi Khusus. Kecenderungan ini mulai tampak sejak tahun 2012, karena menurunnya harga komoditas batu bara di pasaran internasional dan akan diberlakukannya Undang-Undang No. 9 Tahun 2012 tentang Pertambangan, dimana mulai Januari 2014 harus sudah dilakukan ekspor komoditas dalam bentuk jadi melalui kegiatan industri hilirisasi (downstream industries).

**Tabel 3**  
**Pensebaran Izin Penanaman Modal Berdasarkan Sektor Usaha**  
**Pada Triwulan II Tahun 2013 di Provinsi Kalimantan Timur**

No.	Sektor Usaha	Nilai Investasi (juta Rp)	% <sup>1)</sup>
1	Perkebunan Kelapa Sawit & Industri Pengolahannya	4,611,587,34	83.18
2	Industri Pengolahan Kayu	44,235,00	0.80
3	Industri Kimia	266,229,16	4.80
4	Industri Pupuk	459,471,87	8.29
5	Industri Listrik	78,479,74	1.42
6	Jasa Pertambangan	84,310,70	1.52
T o t a l		5,584,928,29	100.00

Keterangan :

1) Prosentase terhadap nilai total.

Sumber : BPPMD Provinsi Kalimantan Timur.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur – sebagai langkah antisipasi terhadap kondisi ekonomi yang tidak sepenuhnya dapat bertumpu lagi pada ekspor migas dan batu bara, sejak dini sudah mencanangkan program transformasi ekonomi yang berbasis pada sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Diantaranya melalui pengembangan industry oleochemical, dimana potensi bahan bakunya berupa CPO cukup tersedia. Sinergi-nya sangat dimungkinkan dengan adanya keberadaan KIPI Maloy, yang dilengkapi dengan fasilitas infrastruktur dasar.

K e p a l a,

TTD

**Diddy Rusdiansyah A.D, SE, MM**

Pembina Tingkat I

NIP. 19640627 199003 1 006

**Informasi lebih lanjut :**

Bidang Pengendalian dan Pengawasan BPPMD Prov. Kaltim

Jl. Basuki Rahmad No. 56 Samarinda 75117

Telp (0541) 743235 – 743487 fax (0541) 736446

Website : <http://bppmd.kaltimprov.go.id>

Email : [humas@bppmd.kaltimprov.go.id](mailto:humas@bppmd.kaltimprov.go.id) dan [humas.bppmdkaltim@gmail.com](mailto:humas.bppmdkaltim@gmail.com)